BAB II

HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*" Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.*"

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah *mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan juga sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.*¹

Dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW, kata kawin yang terdapat dalam surat Al-Baqarah (2) ayat : 230, yang berarti : *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.* Selain terdapat dalam surah Al-Baqarah terdapat pula dalam surah Al-Dzariyat [51] : 49 yang artinya : *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.* Dalam

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2004), h. 128.

surah Ar-Ra'ad : [13] : 03) juga diatur mengenai perkawinan yang artinya *Dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. dan menjadikan padanya semua buah- buahan berpasang-pasangan.* Kemudian surah Ar-Ruum [30] : 21 yang berarti : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* Kemudian Allah berfirman lagi dalam surah Al-Nuur: [24] : 32 yang berarti : *Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.* Di samping ayat-ayat di atas Rasulullah pun menegaskan dalam Sabdanya : *“Nikah itu adalah sunatullah, siapa saja yang benci kepada sunnahku, bukanlah termasuk umatku”.* (HR. Muslim).

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Al-Nikah mempunyai arti Al-Wath'i, Al-Dhommu, Al-Tadakhul, al-Jam'u

atau ibarat ‘an al-wath wa al-aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima; dan akad.

Secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta’ (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan.²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin, pernikahan, pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual.³

Pernikahan secara definisi menurut para ulama fiqih, antara lain sebagai berikut:

a. *Ulama Hanafiyah*, mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut’ah (laki-laki memiliki perempuan seutuhnya) dengansengaja.

b. *Ulama Syafi’iyah* menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu aqad dengan menggunakan lafaz nikah atau jauz yang menyimpan arti memiliki wanita.

c. *Ulama Malikiyah*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu aqad yang menggunakan arti mut’ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harta.

² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Cet., Ke-3. h. 518.

d. *Ulama Hanabilah*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan.⁴

Menurut sarjana hukum pengertian perkawinan adalah :

Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamodjojo. Mengemukakan “pernikahan adalah hubungan antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara dan mendapatkan bukti outentik agar menjadikan pernikahan tersebut dianggap sah oleh Negara”.

Subekti. Mengemukakan “perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”.

Wirjono Prodjodikoro. Mengemukakan “bahwa perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat yang termasuk dalam peraturan-peraturan tersebut”.⁵

B. Syarat Dan Rukun Perkawinan

1. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan terdapat dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isinya sebagai berikut :

Pasal 6 :

1. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai.

⁴ Chuzaimah Tahido yango dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 1994), Cet., Ke-1. h. 53

⁵ *Ibid*, h. 54

2. *Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.*
3. *Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.*
4. *Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.*
5. *Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2,3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.*

6. *Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.*

Pasal 7

1. *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*
2. *Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.*
3. *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. *berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;*

- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;*
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;*
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;*
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;*
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.*

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Syarat Sah Perkawinan Menurut Agama Islam terdapat empat persyaratan sahnya perkawinan menurut jumhur ulama dalam Islam, antara lain:

1. akad nikah (Ijab dan Qabul);
2. calon mempelai laki-laki dan perempuan;
3. wali; dan
4. saksi.

Sementara Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa untuk melaksanakan perkawinan dibutuhkan: calon suami; calon istri; wali nikah; dua saksi; ijab dan qabul.⁶

Syarat perkawinan secara formal diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

⁶ <https://smartlegal.id/smarticle/2018/12/07/persyaratan-pernikahan-di-indonesia/>

- a. setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan
 - b. pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
 - c. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama Bupati Kepala Daerah.
- Syarat formal berikut diatur pada pasal 4 s/d pasal 13.

2. Rukun Perkawinan

Sebagaimana kita ketahui, rukun adalah bagian pokok dari suatu perbuatan yang membuat perbuatan tersebut dinyatakan sah. Contohnya, shalat tidak akan sah tanpa takbiratul ihram, karena takbiratul ihram merupakan bagian pokok dari shalat tersebut.

Sementara dalam bab nikah, rukun nikah berarti bagian dari nikah itu sendiri yang mana ketiadaan salah satu diantaranya akan menjadikan nikah tersebut menjadi tidak sah. Rukun-rukun nikah ada lima, yakni mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, dan shighat.

Dari pemaparan di atas bisa kita pahami bahwa rukun nikah ada lima, yakni:

1. Mempelai pria Mempelai pria yang dimaksud di sini adalah calon suami yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pula oleh Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 42: “*Syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri (yakni Islam dan bukan mahram), tidak terpaksa, ditentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya.*”

2. Mempelai wanita Mempelai wanita yang dimaksud ialah calon istri yang halal dinikahi oleh mempelai pria. Seorang laki-laki dilarang memperistri perempuan yang masuk kategori haram dinikahi. Keharaman itu bisa jadi karena pertalian darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan.

3. Wali di sini ialah orang tua mempelai wanita baik ayah, kakek maupun pamannya dari pihak ayah (‘amm), dan pihak-pihak lainnya. Secara berurutan, yang berhak menjadi wali adalah ayah, lalu kakek dari pihak ayah, saudara lelaki kandung (kakak ataupun adik), saudara lelaki seayah, paman (saudara lelaki ayah), anak lelaki paman dari jalur ayah.

4. Dua saksi Dua saksi ini harus memenuhi syarat adil dan terpercaya. *Imam Abu Suja’* dalam *Matan al-Ghâyah wa Taqrîb* (Surabaya: Al-Hidayah, 2000), hal. 31 mengatakan, wali dan dua saksi membutuhkan enam persyaratan, yakni Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil.”

5. Shighat Shighat di sini meliputi ijab dan qabul yang diucapkan antara wali atau perwakilannya dengan mempelai pria.⁷

Menurut Mohd Idris yang termasuk rukun perkawinan yaitu :

- a. Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan yaitu calon suami dan calon istri.
- b. Wali Nikah
- c. Dua orang saksi dan,
- d. Ijab dan Qabul.⁸

C. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam bab VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yaitu terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 yang isi pasalnya adalah sebagai berikut :

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

1. *Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.*
2. *Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.*
3. *Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.*

⁷ <https://islam.nu.or.id/post/read/84168/lima-rukun-nikah-dan-penjelasan-nya>

⁸ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal.72

Pasal 32

1. *Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.*
2. *Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.*

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

1. *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
2. *Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.*
3. *Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.*

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri juga diatur dalam Al-qur'an, Al-Hadist dan juga menurut para ahli Islam.

Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari menyampaikan dalam kitabnya, *Dhau al Mishbah fi Bayani Ahkam an Nikah* bahwa kewajiban suami kepada istrinya, yaitu harus mempergaulinya dengan baik, *mu'asyarah bi al ma'ruf*. Suami harus memenuhi hak strinya dengan baik seperti maharnya, nafkahnya, mu'nahnya, kiswahnya. Semua itu harus dilakukan oleh suami dengan penuh kerelaan, hati

baik, ucapan yang lemah lembut, dan penuh Kesabaran atas perilaku buruk misalnya si istri berakhlak kurang baik”.

Suami juga harus bisa membimbing istrinya dengan baik dan sabar menuju kebaikan-kebaikan dan ibadah. Mengajari istrinya bagaimana bersuci yang benar sesuai perintah agama, juga membimbing istrinya dengan benar tatkala ia haid, ketika ia shalat serta ketika istri melaksanakan kewajiban-kewajiban agama yang lain.

Firman Allah SWT dalam Surat an Nisaa: 19:

“Dan pergaulilah istri-istri mu sekalian dengan baik”.

Lalu dalam Surat al Baqarah: 228 yang berbunyi :

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Begitu pula bagi istri-istri mereka, wajib mempergauli suami mereka dengan baik. Bagi Laki-laki wajib kepada istri-istri mereka mempergauli dengan baik.

Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari lebih lanjut menyampaikan bahwa hak yang harus diterima oleh istri adalah:

1. Suami harus memberikan nafkah berupa makan, maksudnya uang belanja sehari-hari urusan dapur.
2. Suami harus memberikan pekerjaan yang layak dan pantas kepada istrinya.

3. Suami tidak boleh memukul wajah istrinya.
4. Suami tidak boleh memaki-maki istri, termasuk membentah atau memarahi istrinya kecuali di dalam rumah sendiri\

kewajiban Istri yang harus dilakukan, dan hak yang harus diterima oleh suami adalah:

1. Istri wajib taat kepada suaminya terhadap segala apa saja perintah suami, selagi dalam hal yang diharamkan menurut perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.
2. Istri tidak boleh berpuasa kecuali atas izin suaminya.
3. Istri tidak boleh keluar rumah, kecuali atas izin dan ridla suaminya.
4. Seorang istri harus bersungguh-sungguh mencari ridla suaminya, karena ridla Allah berada didalam ridla suaminya dan marahnya Allah berada di dalam marah suaminya.
5. Sekuat mungkin istri wajib berusaha menjauhi yang sekiranya menyebabkan suaminya marah.

Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari menyampaikan lebih lanjut bahwa seorang istri itu sebaiknya:

1. Menawarkan diri kepada Suaminya, mau tidur atau dalam hal apakah si Suami “kerso” pingin berhubungan badan, atau sekedar bercumbu,

atau yang sejenisnya (karena hal ini adalah salah satu dari hak yang harus diterima oleh suami).

2. Istri tidak berkhianat, atau menyimpang ketika suaminya tidak ada di rumah. Baik terkait urusan ranjang atau tempat tidur, maupun urusan harta suaminya. Apalagi zaman seperti saat ini, godaan-godaan, baik melalui medsos maupun melalui hal lain, begitu gencar dan luar biasa masif, sehingga seorang istri harus bisa menjaga diri.
3. Seorang Istri sebaiknya selalu berpenampilan menarik di depan suaminya, baunya selalu harum dan wangi, menjaga bau mulutnya.
4. Istri juga sebaiknya selalu menjaga performanya, berpenampilan menarik di depan suaminya. (Bukan malah sebaliknya, kalau di depan suaminya berantakan, lusuh, bau, dan lain-lain, giliran ke luar rumah tanpa bersama suami malah berpenampilan semenarik mungkin. Ini kurang tepat; setidaknya yang baik, sama-sama berpenampilan menarik. Apalagi ketika bersama suaminya, tentu harus lebih baik lagi).⁹

D. Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya

Putusnya perceraian dalam perkawinan diatur dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang Menyatakan Bahwa :

Pasal 38

⁹ *Kitab Dhaul Misbah fi Bayani Ahkam an Nikah, karya Hadratussyaikh Kiai Hasyim Asy'ari dan Kitab Madzahib al Arba'ah karya Imam Abdurrahman Al Juzairiy.*

Perkawinan dapat Putus Karena :

- a. Kematian*
- b. Perceraian*
- c. Atas keputusan pengadilan*

Pasal 39

- 1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*
- 2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*
- 3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri*

Pasal 40

- 1. Gugatan Perceraian diajukan kepada pengadilan*
- 2. Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.*

Pasal 41

Akibat Putusnya Perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,*

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.

- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.*
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.*

E. Macam-Macam Harta Dalam Perkawinan

Macam-macam harta dalam perkawinan diatur dalam Bab VII pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 35

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Macam-macam harta dalam perkawinan adalah Harta Bawaan Harta Waris dan Harta Bersama. Dalam skripsi ini penulis akan menguraikan sedikit pembahasan mengenai harta bawaan dan harta waris serta penulis akan fokus pada pembahasan harta bersama.

2. Harta Bawaan

Harta Bawaan menurut pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan) Yaitu harta benda yang telah dimiliki masing-masing suami-istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan, baik yang berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri. Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Artinya, seorang istri atau suami berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing. Tetapi bila suami istri menentukan lain yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan misalnya, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian pula bila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai

dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

3. Harta Waris

Harta waris yang dalam istilah fara'id dinamakan tirkah (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta benda dan hak- hak kebendaan, yang dibenarkan oleh syariat islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Dengan demikian , setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang mati, menurut istilah jumhur fuqaha, dikatakan sebagai tirkah, baik yang meninggal itu mempunyai utang piutang aeniyah atau syahshiyah. Utang piutang aeniyah adalah utang piutang yang ada hubungannya dengan benda seperti: gadai, segala sesuatu yang berhubungan dengan barang yang di gadaikan. Adapun yang dimaksud utang piutang syahsiyah adalah utang piutang yang berkaitan dengan kreditur, seperti qiradh, mahar, dan lain- lain.

Walaupun pengertian tirkah sangat luas, terjadi juga perbedaan pendapat di kalangan para ulama, Golongan hanafiya memiliki tiga pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang mashur bahwa tirkah adalah harta benda yang ditinggalkan si pewaris yang tidak mempunyai hubungan hak dengan orang lain.

Menurut *Madzhab Maliki, Syafi'I* dan *Hanbali* peninggalan ini meliputi semua harta dan hak yang ditinggalkan oleh si pewaris, baik harta benda maupun hak bukan harta benda. Hanya imam

malik saja yang memasukan hak-hak si pewaris, baik hak yang tidak dapat dibagi, seperti hak menjadi wali nikah ke dalam keumuman arti hak-hak.

4. Harta Bersama

a. Pengertian Harta Bersama

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mendefinisikan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena mati. Berbeda dengan harta bawaan masing-masing suami atau isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan harta pribadi yang sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dalam Pengadilan Agama, harta bersama disebut dengan istilah “harta kekayaan dalam perkawinan”. Definisinya terdapat dalam pasal 1 huruf f, dimana dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan.

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, h. 33

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia harta bersama diidentikkan dengan gono gini atau gana gini yaitu harta yang berhasil dikumpulkan secara berumah tangga sehingga menjadi hak berdua diantara suami isteri.¹¹

Dalam Hukum Islam terdapat perbedaan persepsi tentang harta bersama. Pertama, pendapat yang dikemukakan oleh *Sajuti Thalib, S.H* dan *Prof. Dr. Hazairin* yang mengemukakan bahwa dalam Islam dikenal dengan adanya suatu harta bersama yaitu harta yang diperoleh oleh suami atau isteri karena usahanya, baik mereka bekerja bersama-sama atau hanya suami yang bekerja sedang isteri mengurus rumah tangga. Pendapat mereka ini berdasarkan pada Q.S An-Nissa (4):32 yang artinya : *“(Karena) bagi laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.”*

Kedua, pendapat yang mengemukakan bahwa tidak ada harta bersama kecuali Syirqah (perjanjian) antara suami isteri. Menurut madzhab Syafi’i dalam Hukum Islam tidak dikenal adanya pencampuran harta kekayaan antara suami isteri dan isteri karena perkawinan.¹²

¹¹ Tim Penyusun *Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. IX, Jakarta; Balai Pustaka, 1997), h. 28. 7

¹² Mohd. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Pengadilan Agama dan Zakat Menurut Hukum* (Cet. II; Jakarta : Sinar Grafika, 2000), h.30.

Dalam perspektif fiqih Islam, sebagian ulama menganggap harta bersama sebagai harta syirkah yaitu syirkah kepemilikan (syirkah milik/syirkah amlak). Adapun yang dimaksud dengan syirkah kepemilikan yaitu : Kepemilikan bersama atas suatu barang diantara dua orang atau lebih yang terjadi karena adanya salah satu sebab kepemilikan (seperti jual beli, hibah, wasiat dan waris), atau karena adanya pencampuran harta benda yang sulit untuk dipilahpilah dan dibedakan lagi.¹³

Secara garis besar dalam syari'at Islam, syirkah milik ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu : 1. Syirkah milik jabariah Syirkah milik jabariah ini adalah syirkah milik karena berdasarkan nash atau dalil naqli sehingga syirkah tersebut memiliki kekuatan hukum yang tepat. 2. Syirkah milik ikhtiyariyah (usaha) Syirkah milik ikhtiyariyah (usaha) ini adalah syirkah yang didirikan berdasarkan kehendak dan usaha dua orang yang berserikat.¹⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia harta bersama atau harta gono gini secara hukum artinya adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud harta

¹³ Lihat, http://www.e_syari'ahnet. diakses 26 Agustus 2004

¹⁴ Surdarsona, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta : Rineka Cipta, 1992), h. 450

bersama atau harta gono-gini adalah harta perolehan bersama selama bersuami istri.¹⁵

Pengertian lain dikemukakan oleh *Prof. Dr. K. Vandijk* yang mengemukakan bahwa segala sesuatu yang diperoleh secara perkawinan adalah merupakan harta pencaharian yang lazim disebut sebagai harta serikat atau harta bersama.¹⁶

Putusan Mahkamah Agung RI No. 02 K/Ag/19795 yang menyebutkan bahwa harta yang diperoleh secara perkawinan adalah merupakan harta bersama (harta syarekat) antara suami isteri.¹⁷

b. Macam-Macam Harta Bersama

Ada beberapa harta yang berkenaan dengan harta bersama yang lazim dikenal di Indonesia antara lain :

- 1) Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing, harta jerih ini adalah hak dan dikuasai masing-masing pihak suami atau istri.

¹⁵ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. h. 2

¹⁶ Mr. A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat (Cetk. III ; Bandung : Vornik on Hoeve, t.th)*, h. 39.

¹⁷ Mahkamah Agung RI *Yurisprudensi Indonesia, Putusan-putusan Agama (Cet. I; Jakarta, : PT. Garuda Metropolitan Press, 1985) h. 21.*

- 2) Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai mungkin berupa modal usaha atau perabotan rumah tangga atau tempat tinggal, apabila terjadi perceraian maka harta tersebut kembali kepada orang tua atau keluarga yang memberikan semula.
- 3) Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tetapi karena hibah atau warisan dari orang tua mereka atau keluarga terdekat.
- 4) Harta yang diperoleh sesudah mereka dalam hubungan perkawinan berlangsung atau usaha mereka berdua atau salah seorang dari mereka disebut juga harta matapencarian, dan harta jenis ini menjadi harta bersama.¹⁸

c. Ruang Lingkup Harta Bersama

1. Harta yang dibeli selama perkawinan

Patokan pertama untuk menentukan apakah sesuatu barang termasuk objek harta bersama atau bukan, ditentukan pada saat pembelian. Jadi apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa diantara suami isteri yang membelinya. Juga tidak menjadi masalah atas nama suami

¹⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan zakat menurut hukum Islam*, Cet. (Jakarta, Sinar Grafika, 2004) h. 28

atau isteri harta itu terdaftar dan terletak dimanapun. Yang penting, apabila harta itu dibeli dalam perkawinan maka dengan sendirinya menurut hukum menjadi objek harta bersama. Lain halnya jika uang pembeli barang berasal dari harta pribadi suami atau isteri. Jika uang pembelian barang berasal dari harta pribadi, maka barang yang dibeli tersebut tidak termasuk objek harta bersama. Harta yang seperti ini tetap menjadi milik bersangkutan.

2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama.

Patokan berikut untuk menentukan sesuatu barang termasuk objek harta bersama, ditentukan oleh asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadinya perceraian. Misalnya jika suami isteri selama perkawinan memiliki simpanan yang sampai pada perceraian belum dibagi-bagikan. Kemudian jika salah satu pihak yang membeli rumah dari uang simpanan tersebut, maka rumah tersebut tetap menjadi harta bersama dan bukan merupakan harta milik isteri atau harta milik suami. Penerapan yang seperti ini harus dipegang secara utuh untuk menghindari manipulasi dan itikad buruk suami atau isteri. Karena dengan penerapan seperti ini, hukum tetap

dapat menjangkau harta bersama sekalipun harta itu telah berubah bentuk menjadi barang lain. Sekiranya hukum tidak mampu menjangkau hal seperti itu, maka akan banyak terjadi manipulasi harta bersama sesaat setelah terjadinya perceraian, dengan pengharapan agar ia dapat menguasai sepenuhnya seluruh harta bersama. Maka untuk mengatasinya, asas kemutlakan harta bersama harus tetap melekat pada setiap barang dalam jenis dan bentuk apapun asal barang itu berasal dari harta bersama walaupun wujud barang yang baru itu diperoleh atau dibeli sesudah terjadinya perceraian.

3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan

Patokan ini sejalan dengan kaedah hukum harta bersama. Yakni semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun, dalam suatu sengketa harta bersama tidak semulus dan sesederhana itu. Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat akan mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan merupakan harta bersama, tetapi merupakan harta pribadi. Hak kepemilikan seperti ini bisa berdasarkan atas hak kepemilikan, warisan ataupun karena hibah. Apabila terjadi hal seperti ini, maka untuk

menentukan apakah barang tersebut merupakan objek harta bersama atau bukan, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan dari penggugat untuk bisa membuktikan bahwa harta-harta tersebut benar-benar diperoleh selama dalam perkawinan.

4 . Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang berasal dari harta bersama dan dari harta pribadi suami isteri, maka otomatis akan menjadi objek harta bersama dan akan menambah jumlah dari harta bersama. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada di bawah kekuasaan pemiliknya. Namun harta pribadi tidak terlepas fungsinya dari kepentingan keluarga. Barang aslinya memang tidak boleh diganggu gugat, tetapi hasilnya akan menjadi objek harta bersama. Ketentuan ini, berlaku sepanjang suami isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi, maka seluruh hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami isteri menjadi objek harta bersama.

5 . Segala Penghasilan Pribadi Suami Isteri

Menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1971 No. 454 K/SIP/1970 menegaskan bahwa segala penghasilan suami isteri baik dari keuntungan yang diperoleh dari

perdagangan masing-masing ataupun hasil peroleh masing-masing sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami isteri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami isteri, maka tidak terjadi pemisahan. Malahan dengan sendirinya terjadinya penggabungan kedalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi dengan sendirinya terjadi menurut hukum, sepanjang suami isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹⁹

d. Dasar Hukum dari Harta Bersama

a) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta berbagai kitab-kitab hukum fiqh harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya secara rinci. Harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebut bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta satu dengan harta yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam surat An-Nisa ayat 32 yang artinya :

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Keududukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Cet. I ; Jakarta : Garus Metropolitan Press, 1990), h. 303-306

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Berdasarkan ayat di atas bahwa setiap laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula. Ayat tersebut menjelaskan adanya persamaan antara kaum pria dan wanita. Kaum wanita di syariatkan untuk mendapat mata pencaharian sebagaimana kamu pria. Keduanya dibimbing kepada karunia dan kebaikan yang berupa harta dengan jalan beramal dan tidak merasa iri hati.

b) Kompilasi Hukum Islam

Adapun pengaturan harta bersama diatur dalam KHI dalam Bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97.

Peraturan yang paling baru berkenaan harta bersama ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

Pasal 86

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87

1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88

“Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.

Pasal 89

“Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri mupun hartanya sendiri”.

Pasal 90

“Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”.

Pengaturan kekayaan harta bersama diatur dalam

Pasal 91

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud,
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

mengatur mengenai persetujuan penggunaan harta bersama : “suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

1. Pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggung jawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Pasal 95

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita atau jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama dalam masa perkawinan berlangsung.

F. Perceraian dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perceraian

Perceraian (cerai) dalam hukum Islam disebut dengan istilah talak, yang berasal dari bahasa arab الطالق artinya melepaskan. Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, baik ikatan lahir maupun ikatan batin, sedangkan talak menurut syara` adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dengan lafadz

talak.²⁰ KHI mendefinisikan talak sebagai ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.²¹ Dari pengertian diatas, dapatlah dipahami bahwa talak mempunyai arti putusnya ikatan perkawinan atau dengan kata lain perceraian antara suami isteri baik itu timbulnya dari pihak suami ataupun dari pihak isteri bahkan kesepakatan antara keduanya. Sejalan dengan prinsip perkawinan dalam Islam yang mempunyai tujuan bahwa perkawinan adalah untuk selamanya sehingga perceraian merupakan jalan yang boleh di tempuh oleh suami isteri apabila sudah tidak ada kecocokan lagi diantara mereka.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 perceraian dapat terjadi karena: 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan, 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan, 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat

²⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007), 198.

²¹ Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan), (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008), 37.

menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, 6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, 7. Suami melanggar taklik talak, dan 8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²²

2. Macam-Macam Perceraian

- a. Talak raj'iy, talak yang sang suami diberi hak untuk kembali kepada isterinya tanpa melalui nikah baru, selama isterinya itu masih dalam masa iddah. Talak raj'iy itu adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak isteri.
- b. Talak bain, talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada isterinya kecuali dengan nikah baru, talak bain inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan.

3. Dasar Hukum Perceraian

Permasalahan perceraian atau talaq dalam agama Islam sangat dibenci Allah akan tetapi hukumnya diperbolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Hadist. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini:

- a. Surat Al- Baqarah ayat 231

"Apabila kamu mentalaq istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau

²² Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 36.

ceraikanlah mereka dengan cara ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka (hanya) unuk memberi kemudlaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa takut berbuat zalim pada dirinya sendiri, janganlah kamu jadikan hukum Allah suatu permainan dan ingatlah nikmat Allah padamu yaitu hikmah Allah memberikan pelajaran padamu dengan apa yang di turunkan itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah: 231).

b. Hadist Rasulullah SAW

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak”. (H.R. Abi Dawud, dan Al-Hakim, Hadist ini disahihkan oleh Al-Hakim).

Dalam hal ini ditunjukkan pula bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat. Karena perkawinan pada hakekatnya merupakan salah satu anugerah Ilahi yang patut disyukuri. Dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (kufur nikmat). Dan kufur itu tentu dilarang

agama dan tidak halal dilakukan kecuali dengan sangat terpaksa (darurat). Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh. Dengan memperhatikan kemaslahatan atau kemudaharatanya, hukum perceraian adalah sebagai berikut :

1. Wajib Apabila terjadi perselisihan antar suami isteri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakam yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua orang hakam tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib.
2. Sunnah Talak yang dilakukan pada saat isteri mengabaikan hak-hak Allah Ta’ala yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya. Sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya. Atau isterinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya.
3. Mubah Talak yang dilakukan karena ada kebutuhan, misalnya karena buruknya akhlak isteri dan kurang baiknya pergaulan yang hanya mendatangkan mudharat dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan.
4. Haram (Terlarang)

Talak yang dilakukan ketika isteri sedang haid, para ulama Mesir telah sepakat untuk mengharamkannya. Talak ini disebut juga dengan talak bid'ah. Disebut bid'ah karena suami yang menceraikan itu menyalahi sunnah Rasull dan mengabaikan perintah Allah dan RasulNya, 5. Makruh Talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Sebagian ulama ada yang mengatakan mengenai talak yang makruh ini terdapat dua pendapat,⁶⁷ yaitu: Pertama, bahwa talak tersebut haram dilakukan. Karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya juga bagi isterinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Talak ini haram sama seperti tindakan merusak atau menghancurkan harta kekayaan tanpa guna. Kedua, menyatakan bahwa talak seperti itu dibolehkan. Bahwa talak adalah suatu perbuatan yang halal akan tetapi di benci Allah. Talak itu dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntutan dan sebab yang membolehkan, dan karena talak semacam itu dapat membatalkan pernikahan yang menghasilkan kebaikan yang memang disunnahkan sehingga talak itu menjadi makruh hukumnya.